

Efektivitas Program Pengembangan Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember

Fitri Dwi Ardiyanti¹, Anwar², Sutomo³

fitridwi3012@gmail.com

Abstract

Microenterprises are the largest business population in Indonesia, reaching 99.62 percent. Jember Regency has a number of micro businesses of approximately 500,000 to be one of the contributors to the very large GRDP and is a priority for the economic recovery of Jember Regency after the co-19 pandemic through the micro business development program. The implementation of the micro business development program by the cooperative and micro business office of Jember Regency is effective, in accordance with the suitability theory of David C Korten. Some examples of development programs carried out are technological guidance, licensing facilitation, and marketing assistance. The success of this program implementation cannot be separated from the factors that support the program, namely the commitment of the implementing actors and the enthusiasm of the micro business actors. One of the shortcomings of the program is human resources, from the implementing organization and also from the beneficiaries themselves.

Keywords: *effectiveness; program; micro-enterprise*

Abstrak

Usaha Mikro adalah populasi usaha terbesar di Indonesia mencapai 99,62 persen. Kabupaten Jember memiliki jumlah usaha mikro kurang lebih 500.000 menjadi salah satu penyumbang PDRB sangat besar dan menjadi prioritas pemulihan ekonomi Kabupaten Jember pasca pandemi covid-19 melalui program pengembangan usaha mikro. Pelaksanaan program pengembangan usaha mikro oleh dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Jember efektif dilakukan, sesuai dengan teori kesesuaian dari David C Korten. Beberapa contoh dari program pengembangan yang dilakukan yaitu BIMTEK, fasilitasi perizinan, dan bantuan pemasaran. Keberhasilan dari pelaksanaan program ini tidak lepas juga dari faktor yang pendukung program yaitu adanya komitmen para aktor pelaksana serta antusiasme para pelaku usaha mikro. Salah satu kekurangan dari program adalah sumber daya manusia, dari pihak organisasi pelaksana dan juga dari penerima manfaat itu sendiri.

Kata Kunci: *efektivitas, program, usaha mikro*

^{1,2,3} Universitas Jember

1. Pendahuluan

Usaha Mikro yaitu usaha yang bersifat tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan di Indonesia, keahlian atau keterampilan pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit, serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. Usaha mikro merupakan populasi usaha terbesar di Indonesia proporsinya mencapai 99,62 persen dari total 64.166.606 usaha yang ada di Indonesia. Kabupaten Jember sendiri menjadi salah satu daerah dengan jumlah UMKM yang tinggi. Total ada sekitar 647.000 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Jember, 500.000 diantaranya merupakan usaha mikro.

Terjadinya wabah *Coronavirus disease 2019* yang kemudian disebut sebagai Pandemi Covid-19 di akhir tahun 2019 lalu menjadi masalah dunia internasional termasuk di Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan sektor UMKM yang ada di Indonesia. Data dari Bank Indonesia menyebutkan sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah ini sekitar 93,2 persen diantaranya terdampak negatif di sisi penjualan (Saputra, 2021). Dampak pandemi Covid-19 ini tentunya dirasakan juga oleh para pelaku usaha di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember sendiri memiliki aneka ragam sumber daya alam yang dimanfaatkan para masyarakat untuk membuat sebuah usaha.

Peran pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember sangat diperlukan untuk membantu pemulihan usaha mikro di kabupaten Jember. Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Jember pasal 2 ayat 3 dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Jember memiliki peran untuk membantu pemulihan ekonomi usaha mikro dengan membuat kebijakan atau program yang dapat membantu para pelaku usaha mikro untuk bangkit dan berkembang menjadi lebih baik. Sebagaimana dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tugas pokok, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Sesuai dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember memiliki wewenang untuk membuat kebijakan atau program dalam membantu pemulihan ekonomi para pelaku usaha mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membuat beberapa program kegiatan yang dapat membantu pemulihan usaha mikro di Kabupaten Jember, salah satu program tersebut yaitu adalah program pengembangan usaha mikro. Program pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember yaitu para pelaku usaha mikro di bantu fasilitasi dalam hal pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta bimbingan desain dan teknologi. Fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tersebut dimaksudkan untuk bisa membantu para pelaku usaha mikro agar bisa berkembang lebih baik serta diharapkan mampu naik tingkat menjadi para pelaku usaha kecil.

Guna mencapai tujuan-tujuan program yaitu, agar para pelaku usaha mikro dapat bertahan, berkembang, serta naik kelas menjadi para pelaku usaha kecil. Maka program perlu di laksanakan secara efektif. Salah satu model efektivitas pelaksanaan program yaitu yang dipaparkan oleh David C. Korten, dimana model ini berintikan tiga elemen penting yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.

Mengingat Kabupaten Jember memiliki jumlah usaha mikro yang tinggi yaitu sekitar 500.000 dan merupakan salah satu sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Jember, serta menjadi kelompok prioritas dalam pemulihan pasca covid-19. Pentingnya sektor usaha mikro bagi Kabupaten Jember membuat pemerintah daerah memprioritaskan pemulihan kembali usaha mikro agar bangkit kembali dan mampu bertahan kedepannya. Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan program pengembangan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. Apakah program sudah dilakukan dengan efektif sesuai dengan prosedur yang ada dalam program itu sendiri atakau program belum efektif dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dapat menjalankan program-program yang telah dirancang dengan efektif, sehingga program-program tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat pelaku Usaha Mikro.

Definisi Efektivitas Program

Menurut etimologi efektivitas ialah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *effective*. Kata serapan ini menjadi efektif kemudian berubah menjadi efektivitas, sedangkan menurut terminologi efektivitas dapat membawa hasil, sedangkan menurut kegiatan belajar mengajar efektivitas ialah kegiatan yang berkenan dengan sejauhmana sesuatu yang telah direncanakan atau diinginkan sehingga dapat terlaksana atau tercapai. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Rosalina, 2012).

Sedangkan Efektivitas program digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program yang sebelumnya telah ditetapkan. Menurut Rini dan Indah dalam Pradipta dan Hariani (2017) efektivitas program merupakan cara untuk mengukur kesesuaian program dengan tujuan. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Kerkpatrick yang dikutip Cascio dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017) bahwa salah satu evaluasi terhadap program bisa dilakukan dengan melihat reaksi peserta terhadap program yang diikuti.

Efektivitas Pelaksanaan Program

Guna mencapai tujuan-tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperlukan implementasi/pelaksanaan. Program tidak akan ada artinya apabila tidak diimplementasikan. Dalam hal ini program hanya menjadi aturan tertulis saja karena tidak diwujudkan dengan adanya kegiatan. Oleh karena itu, demi mewujudkan tujuan yang ini dicapai dalam suatu program maka perlu di implementasikan.

Salah satu model Implementasi atau pelaksanaan program yaitu model yang dipaparkan oleh David C. Korten dalam Akib dan Tarigan (2000). Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. David Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. David Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur pelaksanaan program. Proses pelaksanaan ini yaitu: Pertama, kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan peminfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (peminfaat). Kedua, kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok peminfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Pengembangan

Menurut French dan Bell (2002) pengembangan adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, terutama melalui manajemen budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaborasi dengan tekanan khusus pada budaya tim kerja formal dengan bantuan agen perubahan (*change agent*), dan pengguna teori serta teknologi ilmiah keperilaku terapan dan mencakup riset kegiatan.

Usaha Mikro

Pengertian Usaha Mikro menurut Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 adalah Kriteria yang termasuk dalam UMKM adalah usaha mikro yang merupakan suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih usahanya kurang lebih 50 juta perbulan. Usaha jenis ini kekayaan yang berupa bangunan maupun perusahaan yang menjadi tempat usaha tidak masuk kedalam kalkulasi. Contoh UMKM yang termasuk kedalam kriteria usaha mikro adalah warung kelontong, peternak ayam, peternak lele, tukang cukur dan warung nasi dan usaha sejenis lainnya.

2. Metodologi

Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini, bertujuan untuk membatasi permasalahan yang ada supaya penulis tidak meneliti sesuatu yang seharusnya tidak masuk dalam masalah penelitian. Dengan kata lain agar peneliti tidak terjebak dalam pengumpulan data yang sangat luas cakupannya dan tidak relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penulis akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya (Idrus, 2009). Berdasarkan pengertian dan fokus penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini fokus penulis adalah pada efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember pada pemulihan usaha mikro.

Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2011). Dengan begitu data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh penulis dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Analisis Data

Menurut Wardiyanta (2006) analisis data merupakan upaya penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sebagainya sehingga dapat mudah dipahami. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Diskusi

Kesesuaian Program Dengan Penerima Manfaat

Model pelaksanaan program yang dikemukakan oleh Korten untuk keberhasilan suatu pelaksanaan program mempunyai faktor yang paling penting selain dua faktor lainnya yaitu program itu sendiri. Program tersebut harus jelas dan juga memuat tentang syarat dan aturan yang harus dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat, yaitu organisasi pelaksana dan juga penerima manfaat. Jika program tersebut memiliki kejelasan tugas, kewajiban dan juga tawaran-tawaran yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh dua pihak lainnya maka pelaksanaan program tersebut tetap berjalan dengan baik. Menurut Korten, pelaksanaan program dilihat melalui kesesuaian antara program dan penerima manfaat yang dilihat dari komponen dan tujuan yang telah tertuang pada program sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat yang nantinya kebutuhan tersebut menjadi capaian dari tujuan program (*output*).

Komponen program pengembangan bagi para peserta program dilihat dari jumlah komponen yang menjadi tanggungan dalam satu kelompok usaha mikro. Program menawarkan bantuan fasilitasi yang dibutuhkan oleh para peserta program yang mana fasilitasi disesuaikan dengan kebutuhan dari para penerima program. Sesuai dengan model kesesuaian dari David C Korten yaitu kesesuaian antara program dan penerima manfaat, program pengembangan usaha mikro sudah sesuai dan efektif dilaksanakan karena terdapat kesesuaian antara program pengembangan usaha mikro dengan para penerima manfaat.

Adanya tujuan program pengembangan usaha mikro sebagai acuan capaian dalam memenuhi visi dan misi. Program pengembangan usaha mikro mempunyai tujuan yaitu untuk peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil. Tujuan yang telah disajikan diatas merupakan suatu output yang dicapai oleh program pengembangan usaha mikro ini untuk membantu usaha mikro menjadi lebih baik. Dalam prakteknya program pengembangan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan

tujuan program yaitu meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro menjadi pelaku usaha kecil atau setidaknya para pelaku usaha mikro berkembang lebih baik (adanya peningkatan dalam usahanya).

Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian program pengembangan usaha mikro dengan organisasi pelaksana artinya adalah organisasi tersebut melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam program pengembangan usaha mikro melalui kemampuannya sehingga apa yang dimaksudkan dalam program pengembangan dapat terlaksana. Hal tersebut berimplikasi pada pelaksanaan program pengembangan usaha mikro di lapangan. Kesesuaian program pengembangan usaha mikro dengan organisasi pelaksana dilihat dari tugas-tugas organisasi pelaksana.

Pada pelaksanaan program pengembangan usaha mikro sangat dibutuhkan organisasi pelaksana yang mumpuni. Aktor yang membantu pelaksanaan program pengembangan usaha mikro ini adalah bidang produksi dan rekonstruksi usaha. Aktor yang paling berperan penting dalam pelaksanaan adalah pendamping. Pendamping yang langsung membantu para peserta, mendampingi secara langsung dan berkordinasi dengan kepala bidang dan kepala dinas.

Setiap kebijakan tidak terlepas dari peran aktor pelaksana, aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan. Pentingnya para aktor pelaksana untuk mengetahui tugasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dan akan mempengaruhi keberhasilan dari program pengembangan itu sendiri.

Program pengembangan usaha mikro dilihat dari model efektivitas kesesuaian program David C Korten tentang kesesuaian nomor dua yaitu adanya kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana (dinas koperasi dan usaha mikro) dilaksanakan dengan efektif atau sudah sesuai. Para pendamping melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada dalam program, melakukan bantuan pendampingan bagi para penerima manfaat yang membutuhkan, membantu pembuatan fasilitasi bagi para penerima manfaat, serta melaksanakan bimtek secara mandiri maupun massal kepada para penerima manfaat sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh program.

Kesesuaian antara Penerima Manfaat dengan Organisasi Pelaksana

Kesesuaian antara penerima manfaat dengan aktor pelaksana dapat dilihat dari tuntutan penerima manfaat kepada tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh organisasi pelaksana. Menurut Korten dalam Haidar (2000), kesesuaian antara penerima manfaat dan pelaksana program adalah kesesuaian antara kebutuhan kelompok penerima manfaat dengan tindakan atau keputusan organisasi pelaksana untuk memenuhi tuntutan yang ditunjukkan oleh aktor pelaksana program agar tujuan dari program dapat tercapai.

Para penerima manfaat dituntut untuk memenuhi persyaratan yang ada agar bisa mengikuti program pengembangan, persyaratan yang ditunjukkan untuk para pelaku usaha mikro cukup mudah yaitu hanya perlu memiliki ktp dan ingin ber usaha atau memiliki usaha aktif.

Selain kewajiban syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro yang ingin mengikuti program, para pelaku usaha mikro yang sudah mengikuti program memiliki hak yang harus dipenuhi. Hak yang harus didapatkan yaitu akses

untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan serta bantuan dalam pembuatan perizinan usaha. Para pendamping selalu mendampingi para pelaku usaha mikro yang membutuhkan bantuan, seperti membantu mendapatkan sertifikasi halal dengan ketentuan hanya perlu membawa persyaratan yang dibutuhkan. Kesesuaian antara penerima manfaat dan pelaksana program yang mana kesesuaian antara kebutuhan kelompok penerima manfaat dengan tindakan atau keputusan organisasi pelaksana untuk memenuhi tuntutan yang ditunjukkan oleh aktor pelaksana program agar tujuan dari program dapat tercapai, terlaksana dengan baik.

Faktor Pendukung

Dalam setiap pelaksanaan sebuah program tentu saja memiliki faktor pendukung supaya dapat mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Suatu program dapat dilaksanakan dengan baik jika terdapat faktor pendukung yang dapat menunjang pelaksanaan program pengembangan usaha mikro di lapangan.

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program pengembangan usaha mikro di Kabupaten Jember yaitu adanya komitmen antar aktor pelaksana program pengembangan usaha mikro. Selain dari komitmen dari para aktor pelaksanaan terdapat juga antusiasme dari masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan usaha mikro ini. Pelaksanaan program pengembangan usaha mikro di Kabupaten Jember mendapatkan dukungan yang baik dari pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah serta mendapat sambutan yang baik dari para pelaku usaha mikro di Kabupaten Jember. Hal tersebut dikarenakan adanya persamaan misi antar aktor pelaksana yang berusaha mewujudkan peningkatan dan kesejahteraan bagi para pelaku usaha mikro untuk bisa berkembang lebih baik lagi.

Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung dalam pelaksanaan program pengembangan usaha mikro terdapat pula faktor penghambat dalam pelaksanaan program pengembangan usaha mikro di Kabupaten Jember. Hambatan atau kendala yang sering dihadapi adalah *mindset* dari para pelaku usaha mikro itu sendiri. Kurangnya pemahaman terhadap bagaimana menjadi wirausaha yang baik, banyaknya para pelaku usaha mikro yang belum sadar dengan potensi usaha yang mereka miliki.

Menurut Soenarko (2000) adanya kekurangan tersedianya sumber-sumber pembantu seperti waktu, uang, dan sumberdaya manusia yang membuat program pengembangan ini terhambat atau terkendala dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat ini menjadi salah satu masalah yang perlu diselesaikan oleh organisasi pelaksana agar program pengembangan berjalan dengan maksimal dan bisa mencapai tujuan yang ada dalam program.

4. Kesimpulan

Program pengembangan usaha mikro yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah sesuai dengan kebijakan yang ada. Program pengembangan usaha mikro sudah efektif dilakukan, yang dilihat dari beberapa aspek yaitu: (1) kesesuaian program dengan penerima manfaat, (2) kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, (3) kesesuaian antara pemanfaat program dengan organisasi pelaksana. Keberhasilan dari pelaksanaan program ini tidak lepas juga dari faktor yang mendukung program yaitu adanya komitmen para aktor pelaksana serta

antusiasme para pelaku usaha mikro. Tetapi walaupun sudah efektif dilaksanakan masih banyak hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro seperti waktu, uang, dan sumberdaya. Waktu yang terbatas dan juga dana yang dibutuhkan tidak selalu tersedia serta beragamnya SDM yang ada sehingga membutuhkan lebih banyak tenaga dan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Kekurangan sumberdaya dalam organisasi pelaksana juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan program.

Daftar Pustaka

- French, B. 2002. *Manajemen*, Edisi ke Enam. Jakarta : PT. Prenhalindo
- Idrus, M. 2009. *Metode penelitian sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage, London.
- Pradipta, R., & Hariani, D. 2017. Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik (Tpe) Di DKI Jakarta (Studi Kasus Jalan H. Agus Salim Atau Jalan Sabang Jakarta Pusat). *Journal of Public Policy and Management Review*
- Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. 2017. Efektivitas Program Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Pasien Pengguna Jasa Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Sronдол). *Journal of Public Policy and Management Review*
- Soenarko, 2000. *Public Policy: Pengertian untuk Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rosalina, I. 2012. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 3.
- Tarigan, A. 2000. Implementasi Kebijakan Jaringan Pengaman Sosial: Studipada program pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak Jawa Barat. Tesis Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Perbub No. 21 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Jember
- Indonesia, R. 2008. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah